

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi keuangan yang terjadi saat ini menuntut perusahaan untuk menyajikan pelaporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dari pelaporan keuangan suatu perusahaan, maka kondisi finansial dan ekonomi perusahaan dapat diketahui. Status ekonomi dan financial tersebut memiliki peran penting pada corporate governance dan harmonisasi akuntansi (Moyes and Baker, 2010; PwC, 2010). Pelaporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan eksternal yang mengukur dan secara rutin mengungkapkan hasil sistem pengendalian, data kuantitatif terkait dengan posisi keuangan dan performa perusahaan (Pallisery, 2012).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Dimana hasil pemeriksaan pada 504 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun LK, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD.

Akan tetapi capaian LKPD ini di bawah target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. Presentase kenaikan opini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Opini LKPD Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintah

Pemerintahan Tahun	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	16	15	0	2	33	105	241	11	41	398	35	55	0	3	93
	48%	45%	0%	6%	100%	26%	61%	3%	10%	100%	38%	59%	0%	3%	100%
2014 (Sem I)	26	7	0	1	34	169	188	4	18	379	56	35	0	0	91
	76%	21%	0%	3%	100%	44%	50%	1%	5%	100%	62%	38%	0%	0%	100%

Penurunan opini LKPD juga terjadi antara lain dari WTP menjadi WDP pada 12 LKPD, yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kota Padang Panjang (Sumatera Barat), Kabupaten Lebong dan Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu), Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah (Kepulauan Bangka Belitung), Kota Semarang (Jawa Tengah), Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Probolinggo (Jawa Timur).

Sementara itu, terdapat 5 LKPD yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TMP, yaitu Kabupaten Batu-Bara (Sumatera Utara), Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), dan Kabupaten Yahukimo (Papua). Dua entitas yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TW yaitu Kabupaten Seluma (Bengkulu) dan Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung).

Pada umumnya penurunan opini disebabkan entitas tidak menerapkan SAP seperti tahun sebelumnya. Ketidaksihesuaian dengan SAP tersebut antara lain meliputi penyajian aset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti.

Adapun, 249 LKPD yang masih mendapatkan opini WDP atau TMP, pada umumnya masih memiliki kelemahan pelaporan keuangan sesuai SAP. Kelemahan tersebut antara lain:

1. Kas digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kas di bendahara pengeluaran tidak dalam penguasaan bendahara, kas pada akhir tahun belum disetorkan ke kas daerah, dan kas disajikan tidak sesuai dengan definisi kas menurut SAP. Permasalahan tersebut terjadi pada 64 entitas. Penyajian saldo piutang pajak dan retribusi per 31 Desember 2014 tidak didukung dengan dokumen data wajib pajak dan wajib retribusi dan belum menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang tidak didukung dengan perincian per wajib pajak.

2. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai pihak lain, tidak didukung dengan bukti kepemilikan, penghapusan dan penyusutannya tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pelaporan aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dalam kartu inventaris barang (KIB) dan tidak ada rekonsiliasi serta tidak dilakukan inventarisasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan aset tetap secara administrasi, hukum dan fisik juga belum dilakukan secara memadai. Permasalahan ini terjadi pada 230 entitas.
3. Belanja Pada belanja barang dan jasa, pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pada belanja modal, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara. Sementara itu, pada belanja subsidi dan bantuan sosial, realisasi belanja tidak sesuai dengan usulan dan tidak didukung laporan pertanggungjawaban. Permasalahan tersebut terjadi pada 73 entitas.
4. Akun Lainnya Akun lainnya yang menyebabkan LKPD tidak memperoleh opini WTP adalah adanya kelemahan dalam pengelolaan Utang PFK dan pendapatan daerah. Selain opini atas LKPD tersebut, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (IHPS 2015 Semester I; 97-104)

Fenomena lain yang terjadi terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 5 anggaran 2013. Menurut R. Rita Dewi P. Selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa sampai saat ini masih ada masalah yang terjadi, masalah pertama yaitu ketidakcocokkan data aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ketidakcocokkan ini umumnya soal adanya dana yang tercatat ganda, atau adanya daftar aset yang tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama nominalnya masih belum bisa memberikan data yang pasti, masalah kedua yaitu penyajian persediaan yang tidak memadai, masalah ke tiga yaitu penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada tahun 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mendapatkan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut H. Abubakar selaku Bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih kembali karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama, menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintah yang dipimpinnya Abubakar menegaskan, akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini secepat mungkin. Dia berharap, kedepan Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/06/02/npb4z8-pemkab-bandung-barat-kembali-raih-wdp>

Laporan keuangan adalah Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Salah satu perangkat yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan adalah sistem akuntansi yang memadai. Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, hal ini disebut sistem pengendalian internal atau dengan kata lain bahwa pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan berlaku.

Laporan keuangan harus mempunyai nilai karena, informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono, 2010). Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Untuk mewujudkan informasi laporan keuangan yang relevan dan andal terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dimaksud adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat semua informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi sehausnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang

menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Sedangkan untuk mewujudkan informasi laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya serta dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud, tidak terdapat kendala sebagaimana menyediakan informasi relevan dan andal sepanjang pembuat laporan keuangan menguasai teknik pembuatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Sistem pengendalian internal menurut Randal dan Alvin (2012, h.322) memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Salah satu dari elemen sistem pengendalian internal tersebut yaitu lingkungan pengendalian yang

merupakan elemen dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar. Lingkungan pengendalian internal juga dapat membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga asset; menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Menurut tujuannya pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu, pengendalian akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian administrasi (internal administrative control). Pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari struktur pengendalian intern meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun beberapa kendala yang mempengaruhi struktur pengendalian intern yaitu :

1. Lingkungan eksternal yang seringkali berubah dengan cepat, misalnya: perkembangan teknologi, tindakan pesaing dan peraturan perusahaan yang semuanya ini mempengaruhi pelaksanaan struktur pengendalian intern.

2. Berbagai kemungkinan kegiatan yang merongrong struktur pengendalian intern misalnya : ada orang yang tidak berhak menganalisis data sehingga rusak dan hilang.
3. Kesulitan mengikuti perkembangan komputer yang sangat pesat, terutama melatih karyawan gunakan sistem baru.
4. Faktor manusia yang dalam beberapa hal tidak patuh mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
5. Rumitnya biaya yang terjadi didalam perusahaan, belum lagi dalam hal mengalokasikan biaya.

Tujuan sistem pengendalian internal untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisir sehingga mengurangi kemungkinan untuk mengalami kekeliruan dan kesalahan. Suatu sistem yang berkualitas dirancang, dibuat dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terkait dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).

Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Wahyono, 2010:12) karena dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut

harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas.

Kualitas kompetitif suatu organisasi bisnis perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki. Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat diperlukan, yaitu SDM yang memiliki kompetensi tertentu yang meliputi aspek pengetahuan (*knowledge, science*), keterampilan (*skill, technology*), dan sikap perilaku (*attitude*) yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Kesuksesan dalam lingkungan organisasi perusahaan yang kompetitif membutuhkan SDM yang berkompeten dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Sutrisno (2010:3) Sumber Daya Manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencaapi tujuan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Bayu Dharma Putra (2015) dengan judul Pengaruh

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus di Kota Padang).

Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada variabel yang diteliti, waktu dan lokasi penelitian. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap beberapa variabel yang menjadi penelitian penulis. Perbedaan waktu dan lokasi penelitian akan berpengaruh terhadap analisis deskriptif mengenai bagaimana Sistem Pengendalian internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kualitas Laporan Keuangan, serta lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung. Perbedaan lokasi ini juga berpengaruh terhadap salah satu variabel yang diteliti oleh penulis yaitu kualitas laporan keuangan. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo serta dilakukan di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PEENGARUHSISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA(SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. (Survey pada Pemerintah Kota Bandung).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis akan mengidentifikasi dan merumuskan masalah dari penelitian.

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Sejalan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dan berpijak pada hasil observasi dan wawancara, maka teridentifikasi beberapa permasalahannya yaitu :

1. Instansi kurang melakukan penerapan kebijakan yang sehat di dalam melakukan pembinaan SDM.
2. Penurunan pengawasan intern telah menjalankan fungsinya dengan efektif.
3. Kurang mengetahui bagaimana standar kerja di instansi.
4. Kurangnya Informasi yang dihasilkan instansi dijadikan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam

penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.
2. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.
4. Seberapa besar Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data dan menganalisis kemudian ditarik kesimpulan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atas Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.

2. Untuk menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis seberapa besar Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung secara simultan dan parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai pengaruh atas sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.

2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan serta masukan yang positif dalam melakukan evaluasi yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian dimasa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu Sistem Informasi Akuntansi, khususnya pengaruh atas Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Bandung Bagian Keuangan atau DPKAD (Dinas Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Adapun waktu penelitian, penulis akan melaksanakan penelitian di tahun 2017.